

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

# Pembagian Paket Sembako Kacau

## Warga non-KTP DKI Jakarta Tak Dapat Bansos

JAKARTA—Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta pada 10 April 2020 warga terdampak sosial Covid-19 mulai resah. Terutama, bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan alias berdagang sebagai mata pencarian utamanya dan buruh pabrik.

Ketua KAWALI DKI Jakarta Mardian, mengatakan pemerintah pusat pun mengambil langkah sigap. Melihat kenyataan yang dihadapi warga terdampak Covid-19, pemerintah membagikan paket sembako ke seluruh wilayah Indonesia. "Tapi sangat disayangkan pembagian paket sembako yang dibagikan Kemensos RI khususnya di wilayah DKI Jakarta dari pantauan KAWALI DKI Jakarta penerimanya tidak merata karena warga yang ber-KTP non-DKI Jakarta harus rela tidak mendapat bantuan paket sembako.

Menurutnya, hal inilah yang menjadi catatan KAWALI DKI Jakarta. Mardian mengaku pilhaknya menelusuri sejauh mana warga KTP NON DKI Jakarta tidak menerima bantuan paket sembako. "Dari info yang didapat warga KTP non-DKI Jakarta terkadang kos di Jakarta tidak melapor ke RT setempat dan bahkan dari pemilik kontrakan atau kos juga tidak melaporkan keberadaan mereka yang ber-KTP non-DKI Jakarta. Oleh karena itulah mereka yang ber-KTP non-DKI Jakarta tidak tercatat sebagai penerima bantuan dan anehnya lagi kadang warga yang ber-KTP non-DKI Jakarta terkesan enggan mencari tau bagaimana agar bisa dapat bantuan paket sembako," paparnya.

Dikatakan, KAWALI DKI Jakarta coba menanyakan lewat call center Dinas Sosial wilayah Jakarta Selatan lewat WhatsApp untuk menanyakan kelanjutan paket sembako. Baik itu bansos dari Kemensos dan Banpres untuk warga ber-KTP non-DKI Ja-

karta. "Sungguh di luar dugaan jawaban WhatsApp dari call center Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta Selatan menyatakan untuk warga ber-KTP non-DKI Jakarta agar menghubungi Kantor Perwakilan Jawa Tengah apabila ber-KTP Jawa Tengah. Seperti inilah SOP untuk mendapatkan bantuan paket sembako untuk warga terdampak Covid-19 yang ber-KTP non-DKI Jakarta," cetusnya.

Dikatakan, dari data Kemennaker angka pengangguran telah melonjak lebih dari dua juta orang dalam 1.5 bulan sejak pandemi Corona (Covid-19) muncul di Indonesia. Oleh sebab itu bantuan sosial yang diberikan pemerintah RI akan menjadi salah satu upaya untuk dapat menjaga agar angka kemiskinan tidak semakin melonjak akibat pandemi Corona.

Menurut Mardian, keresahan warga akan hilang jika kebutuhan pangan tersedia dan aman. Dalam situasi sulit seperti ini yg dibutuhkan masyarakat/warga terdampak Covid-19 adalah

stok bahan pangan selama satu bulan dan bahkan lebih selama pandemi corona (Covid-19) masih ada. "Kegiatan belas kasih dan peduli pada sesama banyak kita jumpai saat ini bahkan pemerintah melalui Kemensos RI membagikan paket sembako untuk warga terdampak Covid-19. Tapi sangat disayangkan pembagian paket sembako tak berjalan sesuai harapan warga yang membutuhkan. Betapa tidak karena isi paket sembako dari Kemensos dan Banpres berkurang dari yang telah diumumkan di media elektronik dan cetak," ujarnya.

Paket Sembako dari Kemensos dan Presiden dibagikan lewat Dinas Sosial wilayah masing-masing. Menurutnya, KAWALI DKI Jakarta menemukan saat paket sembako Banpres dibagikan ke warga Pejompongan Benhil Jakpus lewat Dinsos Jakarta Pusat dengan yang dibagikan ke warga Mampang Prapatan Jakarta Selatan lewat Dinsos Jakarta Selatan terdapat perbedaan isinya.



MELIMPAH - Ilustrasi stok bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan dari Gudang Food Station Cipinang, Jakarta.

Misalnya, isi paket sembako Banpres di Pejompongan Benhil Jakpus antarlain beras 10 kg, mie instan 14 bungkus, minyak goreng 2.000 ml, dua ikan kaleng. Sedangkan isi paket sembako Banpres di Mampang Prapatan Jaksel berupa tiga kantong beras kemasan 5 kg, minyak goreng 2.000 ml, 15 bungkus mie instan, dua bungkus sosis kecil.

"Atas temuan ini KAWALI DKI Jakarta mendesak Pemerintah RI dalam hal ini Kemensos RI melakukan pantauan langsung yang independen agar ke depan jadi lebih baik dan diterima warga sesuai data RT masing-masing. Tidak seperti yang baru-baru ini terjadi data warga terdampak Covid-19 penerima bansos tidak sesuai dengan data yang dimiliki RT," paparnya. (dni)